

Dampak Pendapatan Asli Daerah Dimediasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh

Zainuddin ^{1*}, Muhammad Farras Mufadhdhal ², T. Makmur ³

^{1*} Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

² Program Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

³ Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) serta menganalisis bagaimana Pertumbuhan Ekonomi (PE) berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelaah pengaruh PAD yang dimediasi oleh PE terhadap BM di Provinsi Aceh pada periode 2015–2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari www.bps.go.id dan www.djpk.kemenkeu.go.id. Analisis data dilakukan menggunakan metode Least Squares dan Sobel Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap BM, dan PE terbukti memediasi pengaruh tersebut. Sobel Test menunjukkan bahwa PE memperkuat pengaruh PAD terhadap BM di Provinsi Aceh. Dengan demikian, PAD akan lebih efektif dalam meningkatkan BM jika disertai dengan peningkatan PE.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; Belanja Modal.

Abstract. This study aims to examine the influence of Regional Own-Source Revenue (PAD) on Capital Expenditure (BM) and analyze the mediating role of Economic Growth (PE) in this relationship. Furthermore, this research investigates the impact of PAD, mediated by PE, on BM in Aceh Province during the period of 2015–2023. The data used in this study are secondary data sourced from www.bps.go.id and www.djpk.kemenkeu.go.id. Data analysis was performed using the Least Squares Method and the Sobel Test. The results show that PAD has a significant effect on BM, and PE effectively mediates this relationship. The Sobel Test indicates that PE strengthens the influence of PAD on BM in Aceh Province. Therefore, PAD will have a stronger impact on BM when accompanied by an increase in PE.

Keywords: Regional Own-Source Revenue; Economic Growth; Capital Expenditure.

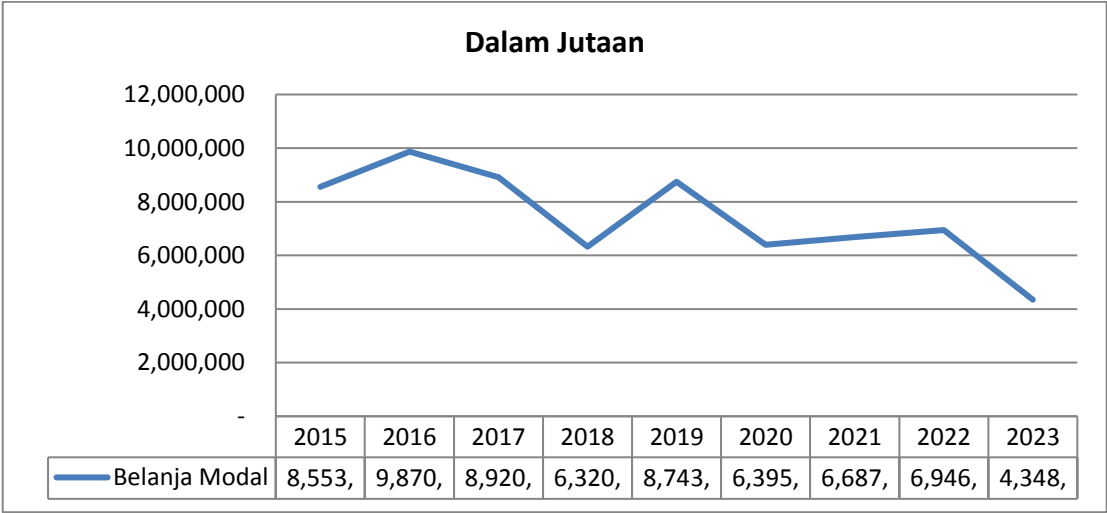
* Corresponding Author. Email: zainuddin@serambimekkah.ac.id ^{1*}.

Pendahuluan

Organisasi pemerintah daerah dihadapkan pada empat jenis belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pemerintah daerah, baik tingkat I maupun tingkat II, dapat melakukan belanja dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, yaitu: 1) belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; 2) belanja modal; 3) belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan; serta 4) belanja tak terduga. Keberlanjutan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya pemerintah Provinsi Aceh, sangat bergantung pada proporsi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu sendiri. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal mencakup, antara lain, pengeluaran untuk

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud (<https://djpk.kemenkeu.go.id>, 2024). Oleh karena itu, indikator efektivitas pengelolaan suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengelola anggaran sangat penting demi tercapainya tujuan kesejahteraan rakyat.

Belanja modal dipandang sangat penting dalam anggaran pemerintah untuk menjamin tersedianya modal dalam pembangunan berkelanjutan di masa depan. Hal ini disebabkan oleh peran belanja modal sebagai elemen penting dalam peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Asmawiah dan Sulistiyo, 2022), serta sebagai cerminan keberlanjutan pembangunan dan investasi (Nugroho dan Ismunawan, 2022). Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keberlanjutan pembangunan dan investasi di Provinsi Aceh sangat ditentukan oleh besarnya alokasi belanja modal yang dikeluarkan. Berikut adalah gambaran belanja modal Provinsi Aceh.



Gambar 1. Grafik Belanja modal

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi tren kenaikan pada belanja modal di Provinsi Aceh, melainkan penurunan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini dapat dikatakan sebagai permasalahan yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak terkait mengapa situasi seperti ini terjadi. Selain itu, belanja modal pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD), sehingga belanja modal itu sendiri dapat ditingkatkan. Seperti yang dinyatakan oleh (Asmawiah dan Sulistiyo, 2022), semakin tinggi PAD, secara otomatis belanja modal juga meningkat. PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Asmawiah dan Sulistiyo, 2022; Ifa, 2017). Selanjutnya, pengaruh PAD dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi belanja modal di suatu pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh PAD

terhadap belanja modal (Jaya dan Dwirandra, 2014). PAD signifikan terhadap belanja modal yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi (Salim, 2019; Adis, 2018). PAD juga dapat mempengaruhi efisiensi kinerja kemandirian pemerintah, yang pada akhirnya turut mempengaruhi belanja modal itu sendiri (Hariani dan Widyawati, 2020).

Oleh sebab itu, analisis ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan jawaban apakah PAD yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Manfaat dari analisis ini adalah memberikan masukan yang berharga bagi pemangku kepentingan mengenai cara memperbesar rasio belanja modal dari peningkatan PAD, serta memperbesar rasio belanja modal dari anggaran pembangunan demi kelangsungan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Tinjauan Literatur

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal mencakup pengeluaran untuk tanah, gedung, bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud (<https://djpk.kemenkeu.go.id>, 2024). Selain itu, belanja modal juga mencakup pembangunan aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai dan meningkatkan produktivitas ekonomi (Lempoy, 2020).

Menurut Nugroho dan Ismunawan (2022), belanja modal adalah pengadaan aset tetap dengan manfaat jangka panjang yang mendukung kegiatan pemerintahan. Belanja modal diukur dari jumlah dana yang dialokasikan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya (Nugroho dan Ismunawan, 2022; Athanasius, 2021). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. PAD berperan penting dalam otonomi daerah, di mana semakin tinggi PAD,

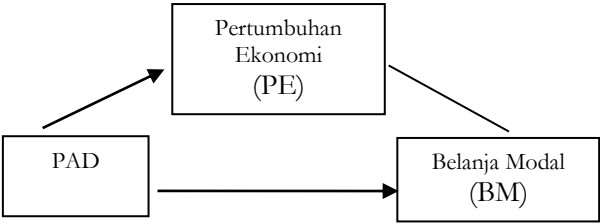
semakin mandiri daerah tersebut dalam hal keuangan (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Susila, 2018). PAD diukur dari jumlah penerimaan daerah yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku (Lasminiasih, 2021; Elim, 2016; Susila, 2018).

Teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh empat faktor utama: luas tanah, jumlah penduduk, barang dan modal, serta teknologi. Sementara itu, teori pertumbuhan Neo-klasik yang dikembangkan oleh Robert Solow menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertambahan dan perkembangan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran agregat (Simon, 2010 dalam Zainuddin, Bakri, dan Mufadhdhal, 2023).

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan model matematis Solow, $Y = f(K, L, A)$, di mana K adalah modal, L adalah tenaga kerja, dan A adalah teknologi (Mankiw, 2007 dalam Zainuddin, Bakri, dan Mufadhdhal, 2023). Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh, yang dihitung berdasarkan nilai tambah barang dan jasa dengan menggunakan harga tahun tertentu (Katalog BPS, 2020). Perhitungannya adalah $PDRB_t - PDRB_{(t-1)}$, di mana $PDRB_t$ adalah PDRB tahun berjalan, dan $PDRB_{(t-1)}$ adalah PDRB tahun sebelumnya (BPS, 2009).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif diskriptif, yaitu menguji pengaruh pendapatan asli daerah sebagai variabel bebas yang dimediasi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi terhadap belanja modal di provinsi Aceh sebagai variabel terikat. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari www.bpg.go.id dan www.djpk.kemenkeu.go.id selama periode pengamatan. Alat analisis data dilakukan dengan model sobel test, yaitu seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Pengujian Sobel Test

Peralatan analisis uji pengaruh langsung variabel beban dan variabel mediasi terhadap variabel terikat adalah:

$BM_{it} = \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PE_{it} + \varepsilon$

$PE_{it} = \beta_1 PAD_{it} + \varepsilon$

Bila nilai prob. t lebih besar dari nilai kritis (nilai prob. t > 0.05), maka secara parsial tidak berpengaruh variabel bebas dan variabel mediasi terhadap variabel terikat. Begitu juga sebaliknya, jika nilai prob t lebih kecil dari nilai kritis (nilai prob t < 0.05), maka secara parsial berpengaruh variabel bebas dan variabel mediasi terhadap variabel terikat. Selanjutnya, untuk melihat apakah variabel mediasi mampu

memediator pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2SEa^2)+(a^2SEb^2)}}$$

Dimana, a adalah koefesin regresi variabel beban terhadap variabel terikat, b adalah koefesian regresi variabel mediasi terhadap variabel terikat, SEa adalah *standard error of estimation* dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel estimasi, dan SEb adalah *standard error of estimation* pengaruh variabel mediasi terhadap variabel bebas. Jika nilai Z > 1.98, maka variabel mediasi dapat memediasi atau signifikan dan jika sebaliknya nilai Z < 1.98, maka tidak signifikan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Tabel 1. Diskripsi Statistik

	BM	PAD	PE
Mean	7420689	2656759	30.86444
Maximum	9870070	5330000	41.42
Minimum	4348250	1972049	21.63
Std. Dev.	1722733	1036454	6.391989
Observations	9	9	9

Sumber: www.bps.go.id dan www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama periode pengamatan 2015-2023 dalam jutaan, nilai rata-rata Belanja Modal (BM) sebesar Rp7.420.689, nilai rata-rata PAD sebesar Rp2.656.759 dan nilai rata-rata PE sebesar Rp30,86444. Nilai maksimum BM sebesar Rp9.870.070 terjadi pada tahun 2016, nilai rata-rata PAD sebesar Rp5.330.000 terjadi pada tahun 2023 dan nilai maksimum PE sebesar Rp41,42 terjadi pada tahun 2023. Kemudian, nilai minimum BM sebesar

Rp4.348.250 terjadi pada tahun 2023, nilai minimum PAD sebesar Rp1.972.049 terjadi pada tahun 2015 dan nilai minimum PE sebesar Rp21,63 terjadi pada tahun 2020. Selanjutnya, sebaran data selama periode pangamatan sesuai dengan nilai standard deviasi untuk masing-masing variabel. Kemudian, untuk hasil uji pengaruh langsung variabel bebas dan variabel mediasi terhadap variabel terikat, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Dengan *Least Squares Method*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	1.303594	0.660188	1.97458	0.0957
PE	10330.45	107048.7	0.096502	0.9263
R-squared	0.57207			
Prob(F-statistic)	0.078364			

Berdasarkan hasil uji ditabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai *prob. t* sebesar 0,0957 lebih besar dari nilai kritis 0,05 tetapi lebih kecil dari nilai kritis 0,1 ($0,0957 > 0,05$ dan $0,0957 < 0,1$), maka dapat disimpulkan bahwa PAD signifikan pada level 10% terhadap BM di provinsi Aceh. Namun, nilai prob t sebesar 0,9263 lebih besar dari nilai kritis 0,05 dan lebih kecil dari 0,1 ($0,9263 > 0,05$ dan $0,9263 < 0,1$), maka dapat disimpulkan PE juga signifikan pada level 10% terhadap BM di provinsi Aceh. Dengan demikian, untuk meningkatkan BM harus dilakukan peningkat PAD dan PE di provinsi Aceh karena tidak terbantahkan peningkatan BM harus tersedianya dana atau budget yang mencukupi, maka ketersediaan

dana tersebut tidak bisa dipisahkan dari meningkatnya PAD dan PE itu sendiri. Hal ini terbukti apabila PAD naik 1 satuan, maka akan meningkatkan BM sebesar 1,303594 satuan. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikatakan oleh (Jaya and Dwirandra 2014) dan (Athanasius 2021). Selanjutnya, apabila terjadi peningkatan 1 satuan PE, maka akan bertambah BM sebesar 10330,45 satuan dan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suprayitno 2015) dan (Widiyanti 2022). Selanjutnya, hasil uji pengaruh variabel bebas terhadap variabel mediasi, seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Dengan *Least Squares Method*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	4.57E-06	1.57E-06	2.912684	0.0226

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilakukan pengujian mediasi dengan model *Sobel Test*, yaitu:

$$Z = \frac{1.303594 \times 10330.45}{\sqrt{(10330.45^2 \times 4.57E-06^2) + (1.303594^2 \times 107048.72)}} = \frac{13466.67}{\sqrt{(106718197.2 \times 2.08849E-13) + (1.6993573168 \times 1.145924E+12)}} = \frac{13466.67}{\sqrt{4.34E+07}} = \frac{13466.67}{6588.03} = 2.04. \text{ Nilai } Z$$

Nilai Z sebesar 2,04 lebih bersar dari nilai1,98 ($2,04 > 1,98$), maka variabel PE dapat memediasi atau signifikan dalam memediasi PAD dalam mempengaruhi belanja modal. Artinya PAD akan lebih kuat mempengaruhi belanja modal bila PE meningkat. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya peningkatan PAD sebenarnya juga merupakan elemen yang dapat meningkatkan PE itu sendiri dan pada akhirnya juga meningkatkan BM dalam periode tertentu. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh (Jaya and Dwirandra 2014) dan (Adis 2018).

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM), dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai variabel mediasi yang juga memberikan

dampak penting dalam memperkuat hubungan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Adis et al. (2018), yang menyatakan bahwa PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di wilayah Jawa Timur. Pada dasarnya, peningkatan PAD berperan dalam meningkatkan alokasi belanja modal, yang mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Peran PAD dalam pembiayaan belanja modal juga diperkuat oleh temuan Asmawiah dan Sulistiyo (2022), yang menemukan bahwa peningkatan PAD secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan belanja modal di Jawa Barat. Selain itu, penelitian Athanasius et al. (2021) menunjukkan hal serupa di Nusa Tenggara Timur, di mana PAD dan Dana Bagi Hasil memengaruhi belanja modal. Peningkatan PAD meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan infrastruktur dan layanan publik.

Pada penelitian ini, Pertumbuhan Ekonomi (PE) terbukti sebagai faktor penting yang memediasi pengaruh PAD terhadap BM. Temuan ini konsisten dengan penelitian Salim (2019), yang menunjukkan bahwa PE memperkuat dampak PAD terhadap belanja

modal di Banten. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk memperkuat PAD dan BM, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian Hariani dan Widyawati (2020) mengungkapkan bahwa PAD dan belanja modal juga berkontribusi pada efisiensi kinerja pemerintah daerah. Mereka menyatakan bahwa peningkatan PAD memungkinkan pemerintah daerah membiayai belanja modal yang lebih besar, sehingga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa PAD memainkan peran penting dalam menggerakkan belanja modal daerah, dan PE memperkuat dampak tersebut. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Jaya dan Dwirandra (2014), yang menunjukkan bahwa PE dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal di Bali. Di Aceh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mencapai peningkatan belanja modal yang signifikan. Hal ini didukung oleh studi Lasminiasih (2021), yang menyoroti pentingnya peningkatan penerimaan daerah, seperti pajak restoran, dalam meningkatkan PAD di Jakarta.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (BM) di Provinsi Aceh selama periode pengamatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan penurunan signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap BM, sementara variabel mediasi, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap BM di Provinsi Aceh selama periode 2015-2023. Temuan ini menunjukkan bahwa PE mampu memediasi hubungan antara PAD dan BM. Dengan kata lain, peningkatan PE akan memperkuat pengaruh PAD terhadap BM, sehingga pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan efektivitas PAD

dalam memengaruhi BM. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan agar pemerintah Provinsi Aceh berfokus pada upaya peningkatan PAD, karena hal ini telah terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan Belanja Modal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh PAD terhadap BM. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Aceh harus memastikan adanya tren pertumbuhan ekonomi yang positif setiap tahun, sehingga Belanja Modal dapat terus meningkat seiring dengan peningkatan PAD dan PE, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan di provinsi tersebut.

Daftar Pustaka

- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2018). Analisis sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95-104.
- Asmawiah, S. H., & Sulistiyo, H. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4150-4157. DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3518>.
- Dantes, H. P., & Lasminiasih, L. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743-2750.
- Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (pad) di provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11818>.

- Fitriana, N., & Sudarti, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(2), 332-345. DOI: <https://doi.org/10.22219/jie.v2i2.7038>.
- Hariani, E., & Febriyastuti, R. (2020). The effect of fiscal stress, original local government revenue and capital expenditures on efficiency ratio of government independence performance. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 12(1), 18-25.
- Ifa, K. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. *Management & Accounting Research Journal*, 2(1).
- Indonesia, R. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Jaya, I. P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 79-92.
- Lempoy, O. P., Morasa, J., & Wokas, H. R. (2020). Analisis Perbandingan Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Periode 2011-2014 dan Periode 2016-2019. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4). DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31168>.
- Nugroho, I. Y. (2022). DETERMINAN BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3), 331-344. DOI: <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.3788>.
- Salim, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Inflasi Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Periode Tahun 2015–2018 (Penelitian Di Kota/Kabupaten Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(2), 164-179.
- Suprayitno, B. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 2(01), 106-112. DOI: <https://doi.org/10.35838/jrap.2015.002.01.10>.
- Twinki, B. S., & Widiyanti, D. R. (2023). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA JAWA BARAT TAHUN 2019-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3). DOI: <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.03>.
- Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. M. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2390>.
- Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. M. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2390>.